

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA BADAN
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

TESIS



**M FATURRAHMAN
NIM. 07012682226001**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Meraih Gelar S2 Administrasi Publik**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

Nama Mahasiswa : **M. FATURRAHMAN**

NIM : 07012682226001

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Bidang Kajian Utama : KEBIJAKAN PUBLIK

Menyetujui,



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
Pembimbing Pertama



Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si
Pembimbing Kedua

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
NIP. 19780512 200212 1 003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

Nama Mahasiswa : M. Faturrahman

NIM : 07012682226001

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik

Tanggal Ujian : 10 Januari 2025

NO.	NAMA DOSEN	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.	Ketua	
2	Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si.	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si	Anggota	
4	Dr. Andries Lionardo, M.Si.	Anggota	
5	Dr. Atrika Iriani, M.Si	Anggota	



Palembang, Januari 2025
Menyetujui,
Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik


Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
NIP. 19780512 200212 1 003

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Faturrahman
NIM : 07012682226001
Tempat / Tanggal lahir : Palembang, 28 Juli 1997
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik
Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Januari 2025
Yang Menyatakan,



M. Faturrahman
NIM. 07012682226001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Faturrahman
NIM : 07012682226001
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik. **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty - Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR”**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang
Pada Tanggal : Januari 2025
Yang Menyatakan,



M. Faturrahman
NIM. 07012682226001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas karunia Tuhan YME, tesis yang berjudul Implementasi Kebijakan SIPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dapat diselesaikan, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelas Magister Sains (M.Si.) pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Pada Kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si. selaku pembimbing I dan kepada Bapak Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si, selaku pembimbing II, atas ketulusan dan keikhlasan untuk meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan, mengarahkan dan menuntun penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepad semua pihak yang telah berjasa hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Alfitri, M.Si beserta jajarannya.
2. Keseluruhan Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
3. Istri saya tercinta yang telah mendukung terus dalam penyelesaian tesis ini, Nadra Karmeyila.

Penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan dan ketidak sempurnaan tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Palembang, 30 Des 2024

M. Faturahman
NIM. 07012682226001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

Karya tulis ilmiah berupa tesis, Januari 2025

M. Fatuurrahman; dibimbing oleh Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si dan Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si.

114 halaman, 14 tabel, 14 gambar, 1 lampiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menelaah dan menemukan data sedetail-detailnya terkait Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Ripley and Franklin yang dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu melihat kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja atau dampak yang dikehendaki. Adapun faktor yang mempengaruhi kebijakan dengan mereferensi dari teori George C. Edwards III dilihat dari 4 (empat) variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis dengan kerangka berpikir Ripley and Franklin yang dikaitkan dengan 3 (tiga) komponen SIPD. Selain itu, hasil penelitian faktor yang mempengaruhi implementasi dikaitkan dengan 4 (vempat) variabel agar implementasi kebijakan berjalan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi kurangnya pelatihan teknis, gangguan sistem, keterbatasan sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Adapun faktor pendukung mencakup kebijakan pusat yang mewajibkan penerapan SIPD dan komitmen internal dari Bappeda untuk mengoptimalkan sistem. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi komunikasi yang kurang konsisten, keterbatasan koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya panduan teknis dari pemerintah pusat. Untuk mengoptimalkan implementasi SIPD, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, penguatan infrastruktur teknologi, serta perbaikan komunikasi dan koordinasi antarlembaga. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi SIPD diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, SIPD, Bappeda, Kepatuhan, Koordinasi

Pembimbing I



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.

Pembimbing II



Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si.

Mengetahui Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
NIP. 197605122012 12 1 003

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM (SIPD) POLICY AT THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY OF OGAN ILIR REGENCY

Scientific paper in the form of thesis, January 2025

M. Faturrahman; supervised by Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si and Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si.

114 pages, 14 tables, 14 figures, 1 attachment

This research aims to examine the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) policy at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Ogan Ilir Regency. The study uses Ripley and Franklin's policy implementation theory, focusing on three aspects: compliance, smooth execution of routine functions, and achieving desired performance or impact. The factors influencing the policy are based on George C. Edwards III's theory, which includes four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research uses a qualitative descriptive method with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings show that challenges include insufficient technical training, system disruptions, limited human resources, and inadequate technological infrastructure. Supportive factors include central government policies mandating SIPD implementation and Bappeda's internal commitment. Challenges also involve inconsistent communication, limited vertical coordination between central and regional governments, and a lack of technical guidance. To optimize SIPD implementation, strategic steps are needed, such as improving human resource capacity through training, enhancing technological infrastructure, and improving communication and coordination between agencies. These steps are expected to make regional development planning more effective, efficient, and accountable.

Keywords: Implementation, Policy, SIPD, Bappeda, Compliance, Coordination

Advisor I

Advisor II


Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.


Dr. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si.

Knowing The Program Study Coordinator
Magister of Public Administration


Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.

IP. 197605121012 12 1 003

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Kebijakan Publik	9
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik	11
2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik	19
2.1.4 Model Implementasi yang dipakai pada penelitian ini	27
2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan	30
2.1.6 E-Government	33
2.1.7 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	34
2.2 Penelitan Terdahulu	38
2.3 Kerangka Pemikiran	52

BAB III	53
METODE PENELITIAN	53
3.1 Desain Penelitian	53
3.2 Definisi Konsep	53
3.3 Fokus Penelitian	54
3.4 Jenis dan Sumber Data	57
3.5 Teknik Pengumpulan Data	58
3.6 Teknik Analisis	60
3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian	61
BAB IV	63
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	63
4.1 Sejarah BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir	63
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir	63
4.2.1 Tugas Pokok BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir	63
4.2.2 Fungsi BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir	64
4.3 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir	65
4.4 Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir	73
BAB V	78
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
5.1 Implementasi Kebijakan SIPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir	78
5.1.1 Pendekatan Kepatuhan	78
5.1.1.1 Ketersediaan Komponen SIPD	78
5.1.1.2 Akurasi Pendataan Dinas	87

5.1.2 Pendekatan Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi.....	91
5.1.2.1 Proses Pelaksanaan SIPD Perencanaan	91
5.1.2.2 Pemuktahiran Data SIPD.....	93
5.1.2.3 Pelatihan Teknis Operator SIPD.....	95
5.1.3 Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang di Kehendaki	97
5.1.3.1 Terbentuknya Data Perencanaan yang Akurat.....	97
5.1.3.2 Peningkatan Kualitas Administrasi	99
5.1.3.3 Peningkatan Kualitas SDM SIPD	100
5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	101
5.2.1 Faktor-faktor yang Mendukung	101
5.2.2 Faktor-faktor yang Menghambat	105
5.3 Rekapitulasi Hasil Temuan.....	108
BAB VI.....	111
KESIMPULAN DAN SARAN	111
6.1 Kesimpulan.....	111
6.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1	Permasalahan Pada SIPD Tahun 2024.....	6
2.1	Kelompok Data SIPD	35
2.2	Matriks Ringkasan Penelitian Terdahulu	39
3.1	Fokus Penelitian	55
3.2	Informan.....	59
4.1	Komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan jenis kelamin.....	73
4.2	Komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan pendidikan.....	74
4.3	Komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan diklat kepemimpinan.....	74
4.4	Komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan golongan.....	75
4.5	Komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan jabatan.....	76
4.6	Komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan ilmu pendidikan	77
5.1	Komponen SIPD	79
5.2	Tenaga Operasional SIPD pada BAPPEDA Kab Ogan Ilir.....	86
5.3	Rekapitulasi Hasil Temuan	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2015, 195 negara melakukan kesepakatan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa mereka dapat mengubah dunia menjadi lebih baik dengan mewujudkan *The Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dibangun atas komitmen semua negara untuk tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Perjanjian secara global dan inklusif ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar negara menuju 2030 melalui tindakan positif dan keterlibatan dalam kemitraan strategis. Terdapat 17 agenda dalam mewujudkan *The Sustainable Development Goals* (SDGs).

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial dengan berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Kebijakan yang mempunyai hubungan dengan publik disebut dengan kebijakan publik. Kebijakan publik ini lahir dari adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuat kebijakan publik disebut dengan *stakeholder*. *Stakeholder* dalam pembuatan kebijakan publik adalah pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan asas kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah hubungan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari

hasil akhir kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah (Desrinelti et al., 2021).

Dalam konteks negara modern, kebijakan publik ini telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Kebijakan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik (Pramudiana, 2016).

Salah satu inovasi kebijakan yang ditawarkan sekarang adalah kebijakan mengenai sistem informasi, dimana sistem informasi saat ini berkembang dengan pesat dan memiliki pengaruh yang besar sehingga makin bernilai tinggi dalam sebuah organisasi. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau perkembangan pemerintah dengan membangun sebuah sistem (Amanah, 2018).

Sebagai upaya membangun sebuah sistem tersebut, Pemerintah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengupayakan penerapan konsep *e-government* untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah yang ada di tingkat pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dengan membangun sebuah sistem informasi yang secara online dapat berjalan secara efisien dan mandiri serta memudahkan siapa saja, kapan saja dan dimana saja untuk mengakses data informasi yang diinginkan melalui sebuah sistem data dan informasi yang disebut Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang disingkat SIPD (Frans Dione, 2020).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun di pusat. Selain itu bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk pola kerjasama berbasis data dan informasi (Kemendagri, 2019).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah (Nasution & Nurwani, 2021).

Perencanaan pembangunan pada masing-masing daerah ini merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi misi daerah, karena dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai target pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi daerah. Dalam konteks nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan sebagai berikut: perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Ekaputra, 2021).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) juga memiliki peran dalam mencapai tujuan yang ada pada Sustainable Development Goals (SDGs). Menurut Aliyaa Dalam hal ini mengacu pada 17 tujuan SDGs yang telah ditetapkan PBB yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, industri dan inovasi, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini mengacu pada tujuan SDGs yang ke-9 yaitu mengenai infrastruktur, industri dan inovasi. Adapun target dari SDGS

ke-9 yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif dan secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.

SDGs diharapkan menjadi wujud pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan berkelanjutan yang menjaga kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup dari generasi ke generasi. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dituntut untuk turut serta dalam mewujudkan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini. Tujuan dari SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas dari berbagai aspek. Oleh karena itu, SDGs perlu dijadikan sebagai acuan dalam rangka pembangunan baik di lingkup nasional maupun daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 disebutkan bahwasannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ini berkaitan dengan prosedur, penyediaan, pengawalan, dan penilaian pelaksanaan rancangan pembangunan. Hal ini apabila diterapkan dengan baik akan berdampak meningkatnya kualitas perancangan pembangunan wilayah, pemantauan dan penilaian didukung oleh ketersediaan data dan maklumat pembangunan wilayah yang tepat, terkini dan bertanggungjawab serta adanya pelaksanaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas perancangan, pemantauan dan penilaian pembangunan daerah (Vira & Husna, 2022).

SIPD merupakan aplikasi baru yang membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Aplikasi SIPD yang begitu kompleks dan minimnya sosialisasi penggunaan SIPD menjadi salah satu fenomena penghambat pengimplementasian SIPD. Sebelumnya proses input perencanaan

pembangunan menggunakan aplikasi Simda Perencanaan. Pada tanggal 12 Januari 2021 Kemendagri membuat kebijakan yang memperbolehkan pemerintah daerah menggunakan aplikasi selain simda secara paralel dengan catatan tetap menginput dalam SIPD, akan tetapi hal tersebut menjadi pr tersendiri bagi para operator karena harus melakukan input data yang berulang. Kemendagri dinilai tidak konsisten dalam pemberlakuan mengenai kebijakan penggunaan SIPD. Aplikasi SIPD pun masih dalam tahap pengembangan, transmisi komunikasi kurang memadai, pelaksana kebijakan belum memahami kewenangannya, dan belum ada insentif bagi pelaksana SIPD ini.

Perencanaan pembangunan daerah ini tentu memiliki kendala dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang terjadi ini akibat beberapa hal seperti data-data pembangunan daerah yang tidak lengkap dan tersebar di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta tidak diperbaharui secara berkala, sehingga Instansi yang berfungsi sebagai unit perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini yaitu Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) mengalami kendala dalam mengumpulkan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan daerah karena lemahnya koordinasi antara Bappeda dan OPD (Heldan et al., 2021).

Permasalahan lain yang menghambat Implementasi Permendagri No 70 tahun 2019 yang terjadi di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir adalah pelaksanaan sosialisasi terhadap SIPD hanya dilaksanakan setahun sekali serta layanan informasi terkait SIPD tidak tersedia untuk di akses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga terjadinya keterlambatan penginputan data perencanaan, keterlambatan pemuktahiran data sub kegiatan serta perubahan kodefikasi dan nomenklatur kegiatan di Aplikasi SIPD yang membuat data dan informasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Ogan Ilir susah untuk diketahui oleh Bappeda Kabupaten Ogan Ilir sebagai komponen utama perencanaan di Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini menjadi permasalahan yang rutin dihadapi pemerintah

khusus nya Bappeda. Akibat nya data dan informasi yang diperoleh pun terkadang tidak valid dan akurat.

Tabel 1.1
Permasalahan Pada SIPD Tahun 2024

No.	Permasalahan	Tanggal	Penyebab
1	Keterlambatan Penginputan Rencana Kerja di Aplikasi SIPD	20 Juni 2024	Internet bermasalah
2	Keterlambatan Pemuktahiran Sub Kegiatan di Aplikasi SIPD	13 Juli 2024	Operator yang kurang paham
3	Pemuktahiran Kodefikasi dan Nomenklatur Kegiatan di Aplikasi SIPD	27 Agustus 2024	Adanya perubahan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-3406

Sumber: Data BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir, 2024

Fenomena SIPD sudah menarik perhatian para peneliti di Indonesia. Para peneliti sebelumnya sudah mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi SIPD, yakni kegagalan jaringan antar pemerintah, tidak adanya kewenangan pusat yang mengatur pelaksanaannya dalam pelaksanaannya, implementasi berbasis jaringan ini berbasis wilayah (Vina & Husna, 2022), kualitas SDM, minimnya bimbingan teknis, pegawai yang tidak disiplin (Wurara, 2020), minimnya regulasi dan aplikasi yang kurang berkualitas (Karungdeng, 2021), Perangkat daerah tidak berani melaksanakan kegiatan tersebut diakibatkan sistem ini belum mengakomodir bahkan sampai titik spasial (Adriani, 2022). Kurangnya pemahaman terhadap aplikasi dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang membingungkan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dokumen RKPD (Ekaputra, 2021).

Selain soal faktor-faktor yang mempengaruhi SIPD, para peneliti juga meneliti perihal kinerja SIPD. Salah satu peneliti berpendapat bahwa kinerja SIPD sudah bagus (Putri, 2020). Implementasi Aplikasi SIPD dilihat dari aspek struktur birokrasi dapat dikatakan sudah terimplementasi (Arief dan

Hayati, 2021). Bahkan di Kabupaten Tangerang telah berhasil diimplementasikan dengan nama domain sipd.tangerangkab.go.id, dan sistem tersebut telah dihosting di server Diskominfo (Winarno, 2019) Tetapi, Sebagian lagi menemukan bahwa kinerja SIPD kurang optimal (Adriani, 2022). Optimalisasi efektivitas SIPD dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar instansi di lingkungan Kota Pontianak guna pemutakhiran data SIPD oleh OPD yang bertanggung jawab atas keabsahan dan ketersediaan data tersebut (Deseverians dan Wulandari, 2020).

Inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya ini mendorong peneliti untuk mendalami lebih jauh implementasi SIPD. Penelitian ini akan berkontribusi terhadap pengetahuan baru SIPD karena belum ada penelitian mengenai implementasi SIPD, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah sehingga kedepannya dapat digunakan sebagai pertimbangan penerapan kebijakan.

Berdasarkan latar belakang ini penulis akan melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ogan Ilir?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bappeda Kabupaten Ogan ilir.
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ogan Ilir.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan karena akan menambah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya. Ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk pengembangan studi Implementasi Kebijakan Publik.

2. Secara Praktis

a. Bappeda Kabupaten Ogan Ilir

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada Bappeda guna meningkatkan upaya dan strategi dalam melaksanakan SIPD serta menjadi bahan masukan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pelaksanaan SIPD di Kabupaten Ogan Ilir.

b. Peneliti

Bagi peneliti di harapkan penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang telah di peroleh peneliti selama mengikuti pendidikan di Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Sriwijaya sampai saat ini.

c. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi dan referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Dalam pengoptimalan implementasi SIPD perlu adanya inovasi berupa ruangan khusus pelaksanaan SIPD yang didalamnya terdapat komputer khusus dan jaringan internet satelit di tiap dinas, melihat sangat pentingnya kegiatan SIPD untuk keberlangsungan program dan kegiatan pemerintah daerah agar berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, E. A. (2018). Penggunaan Software ATLAS.ti sebagai Alat Bantu Proses Analisis Data Kualitatif. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 5(2), 53–63. <https://doi.org/10.31980/mosharafa.v5i2.260>
- Ahmad Fahmi Arief, R. H. (2021). IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 4(70), 732–749.
- Amanah, N. (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang*. 1–54.
- Al Fatih, Andi, 2010, *Implementasi Kebijakan dan IPemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam Rangka \ Memberdaya Usaha Kecil)*, UNPAD PRESS, Bandung.
- Andika, T. H., Setiawan, A. E., Feriyanto, D., & Afdhalluddin, A. (2020). Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Studi Kasus Pada Bappeda Kabupaten Pringsewu). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu (ABDI KE UNGU) Universitas Aisyah Pringsewu*, 2(3), 144–147.
- Apniwansyah, G., Widiantara, I. P., & ... (2022). Upaya Mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Societas: Jurnal Ilmu ...*, 11(April), 96–108. <http://www.ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/4350>
- Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 146–161. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design* (Vol. 15, Issue 2).
- Deseverians, W. (2020). EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 7(1), 13–30.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep

- pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
<https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk Nanda. *Otonomi Vol. 21 Nomor 1*, 21(1), 62–79.
<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Fatta, H. Al. (2007). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. Andi.
<https://bit.ly/3I03nS0>
- Fauzi, I. (2018). *PERENCANAAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH OLEH BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN BAPPEDA KOTA SURAKARTA TUGAS*. 7(2), 44–68.
- Frans, D., Faradina, & Utami. (2020). Implementation of Regional Development Information System (SIPD) in Increasing Coordination of Regional Development. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21–28.
<https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061>
- Heldan, E., Malik, M., & Pratito, M. A. (2021). Efektivitas Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro). *Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik (e-JKPP)*, 7(2), 1–12. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/2106>
- Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Government*, 1(2), 1–8.
- Kemendagri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*. 2016(1038), 1–19.
- Langbein, L. (2014). Public Program Evaluation. In *Public Program Evaluation*.
<https://doi.org/10.4324/9781315701363>
- Milles, Matthew B., A. Michael Huberman, and johny saldana. 2019. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Vol. 148. SAGE, USA.
- Lusi Adriani. (2021). Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Informasi

- Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Dumai (Studi Kasus Pada Aplikasi E-Planning). *Jurnal Niara*, 14(3), 275–283. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7390>
- Mait, A. S., Lumolos, J., & Monintja, D. (2020). Analisis Penerapan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulut). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–11.
- Nadya, C. ; A. K. ; N. K., & Wurara, C. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–13.
- Nasution, muhammad irfan, & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nathasya, N. D., & Nurmiati, S. (2019). Perancangan Sistem Informasi Administrasi Di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok. *Komputasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Dan Matematika*, 15(2), 152–163. <https://doi.org/10.33751/komputasi.v15i2.1381>
- Ripley, R.B dan Franklin G.A, 1982. *Policy Implementation and Bureaucracy*, Diterjemahkan oleh Muhammad Sadili, The Dosey Press, Chicago.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan IR & D*, Alfabeta, Bandung.
- Winarno, Budi, (2002), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Presindo, Yogyakarta.
- Pramudiana, I. D. (2016). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Penyandang Cacat. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 9(1), 25 30.

- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Reni, K. P. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi*, 1, 1–12.
- Ruhana, F. (2017). Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia. *Manajemen Pembangunan*, 4(2), 1–25.
- Sudianing, Ni Ketut; Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 1–22.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. alfabeta.
- Vira, Y., & Husna, C. A. (2022). Implementasi Sipd (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) Dalam Proses Perencanaan Di Kabupaten Aceh Barat. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 1(9), 536–541. <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i9.68>
- Winarno, P., Kusnadi, A., & Afriliana, N. (2019). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tangerang. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2, 117–123. <https://doi.org/10.37695/pkmsr.v2i0.500>
- Yuswarni, & Husaini. (2019). JSH, Vol. 2 No. 2, Desember 2019. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 1–7.